

INTEGRASI POLA KERJASAMA KOMITE MADRASAHDAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Asnawan

Institut Agama Islam Al Falah As Sunniyyah Kencong Jember, Indonesia

Email: asnawan@inaifas.ac.id

Abstract: This paper is about the pattern of cooperation between the committee and the head of the madrasa in the form of a monthly meeting. On the agenda of the monthly meeting usually discuss what are the problems that exist, or reporting about the financial that has been obtained and issued. In cooperation between the committee and the head of the madrasah, individuals are established in a good relationship, with the concept of mutual respect and mutual respect. Relationships that, like if a problem occurs, can be solved by giving suggestions or considerations in solving existing problems or with communication links, holding meetings for deliberations to reach consensus. In addition, relationships are woven by providing motivation and support in development. The relationship is horizontal means that the line has a specific goal including coordinating tasks, sharing information for planning and activities, solving problems that arise between people who are in the same level, guaranteeing the same understanding.

Keywords: Head of Madrasah, Madrasah Committee, Teacher Competence

Abstrak: Tulisan ini tentang pola kerja sama antara komite dan kepala madrasah tersebut dalam bentuk rapat bulanan. Pada agenda rapat bulanan tersebut biasanya membahas perihal apa saja masalah-masalah yang ada, atau pelaporan tentang keuangan yang sudah didapat dan dikeluarkan. Dalam kerja sama yang dijalin antara komite dan kepala madrasah secara Individu terjalin hubungan yang baik, dengan konsep saling menghargai dan saling menghormati. Hubungan yang seperti halnya jika terjadi suatu masalah maka dapat dipecahkan dengan cara memberikan usulan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam penyelesaian masalah yang ada atau dengan jalinan komunikasi, mengadakan rapat untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu juga hubungan yang dijalin dengan memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan. Hubungannya mendatar artinya garis itu mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas, saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas, memecahkan masalah yang timbul diantara orang-orang yang berada dalam tingkat yang sama, menjamin pemahaman yang sama.

Kata Kunci: Kepala Madrasah, Komite Madrasah, Kompetensi Guru

Pendahuluan

Lembaga pendidikan formal yang biasa disebut dengan sekolah atau Madrasah, merupakan pranata sosial yang terus berkembang dari masa ke masa yang biasa diselenggarakan secara massal untuk umum dengan standard kurikulum tertentu pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dikarenakan pendidikan merupakan pranata sosial, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan sebagaimana tertuang dalam paradigma baru tripusat pendidikan dimana semua orang (Orang tua dalam keluarga, Kepala sekolah dan guru di sekolah serta masyarakat) bekerja sama mendidik anak-anak dengan baik.¹

Keluarga (*Home*), sekolah (*School*) dan masyarakat (*community*) memiliki pola hubungan yang amat rapat, dan bahkan seharusnya bersatu padu secara sinergis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum adanya Komite Sekolah, sudah ada Badan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Konsep otonomi daerah yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sejak era reformasi telah menjadi agenda penting yang diterapkan dalam setiap bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Dalam konteks ini, otonomi di bidang pendidikan merupakan upaya mengembalikan pengelolaan pendidikan kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan pendidikan di daerah masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, tema sentral dari otonomi pendidikan adalah desentralisasi. Konsep “desentralisasi” mengisyaratkan adanya penyebaran sesuatu yang sebelumnya terpusat atau terkumpul pada satu tempat saja.² Dalam konteks pendidikan, desentralisasi pendidikan berarti pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal perencanaan, pengelolaan, pengalihan dana, dan alokasi sumber daya pendidikan kepada pemerintah daerah. Keputusan-keputusan desentralisasi secara langsung berpengaruh terhadap siswa seperti keputusan program pendidikan, keputusan kurikulum, keputusan alokasi waktu, keputusan instruksional, dan lain-lain.

Konsep desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah memberikan otonomi pada tingkat satuan pendidikan, karena sekolah (Kepala Sekolah) adalah pihak yang lebih mengetahui tentang permasalahan yang dihadapinya dan kebutuhan yang diperlukannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya pemerintah dalam memberikan otonomi pada tingkat satuan pendidikan diantaranya dilakukan dengan program manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pendidikan berbasis masyarakat. MBS bertujuan agar sekolah (Kepala Sekolah) mampu mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kebutuhan-kebutuhannya, tujuan pendidikannya, serta mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga menjadi sekolah yang mandiri.

Pendidikan berbasis kepada kebutuhan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, sehingga hubungan kerjasama masyarakat dan sekolah menjadi lebih harmonis. Hubungan kerjasama yang harmonis (gotong-royong) antara sekolah dan masyarakat sudah tercipta pada jaman awal kemerdekaan, Sekolah yang mandiri memerlukan dukungan dan kepedulian masyarakat agar sekolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi *stakeholder* utama pendidikan. Wadah untuk menyalurkan aspirasi, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan diwujudkan dalam lembaga mandiri yang bernama Komite Sekolah.

¹ Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite sekolah; Sejarah dan Prospeknya Di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008), 5

² LIPI, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Diantara Peluang dan Tantangan*, (Menteng Jakarta: LIPI Pers, Anggota IKAPI, 2008), 165



Komite Sekolah sebagai wakil dari kepedulian masyarakat terhadap mutu ekolah merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam aktivitas pembelajaran secara eksternal. Komite Sekolah berfungsi untuk:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan fasilitas pendidikan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah;
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Hal ini terlepas pula dari kepemimpinan kepala sekolah.

Tujuan

Tujuan dalam penulisan artikel ini ialah menjelaskan peran kepemimpinan kepala sekolah akan sangat menentukan dalam proses peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya karena kepala sekolah merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan di sekolah. Kepemimpinan Kepala sekolah dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan segala sumber daya yang ada, dan memanfaatkannya untuk belajar siswa. “Kepala Sekolah yang berkompoten harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, *performance*, dan etika kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Sekolah”.³

Kompetensi Kepala Sekolah yang profesional harus mampu melakukan pengelolaan segala sumber daya yang ada untuk mendukung suasana belajar yang kondusif. Kepala Sekolah berkewajiban mengelola tenaga kependidikan, seperti melakukan perencanaan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya, menginventarisasi karakteristik guru dan tenaga kependidikan yang efektif, serta memelihara dokumentasi sekolah. Melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan seperti memfasilitasi pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan, memanfaatkan, menilai kinerja, mengelola konflik, dan memotivasi tenaga kependidikan, serta mengembangkan sistem pembinaan karier. Mengelola kesiswaaan, seperti melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB), mengembangkan potensi siswa sesuai dengan minat, bakat, kreatifitas dan potensi siswa.

Kajian Koseptual Dan Pembahasan

Pola Kerja Sama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah

Pola kerjasama komete sekolah/madrasah dan kepala sekolah dalam rangka membangun hubungan yang baik dan menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus mampu dan cakap dalam membangun pola-pola hubungan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan dan Sistem Pendidikan Nasional* 2006: 32), 234



antara sekolah dengan masyarakat dan ketika tercipta hubungan yang baik dibutuhkan kecakapan untuk mengelola hubungan tersebut sehingga menjadi sebuah pola yang sinergi.

Seperti yang dikemukakan oleh depdiknas tahun 2002, bahwa bahwa kepala sekolah harus memiliki kualifikasi dalam hubungan sekolah dan masyarakatnya yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Pengelolaan hubungan sekolah/masyarakat. 2) Bekerja sama dengan komite sekolah atau dewan sekolah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat pengembangan sekolah. 3) Mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat (dana, pemikiran dan tenaga) bagi pengembangan sekolah. 4) Menyusun rencana dan program pelibatan orang tua siswa dan masyarakat. 5) Mempromosikan sekolah. 6) Membina kerjasama dengan pemerintah dan lembaga masyarakat. 7) Membina hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa.

Dalam kedudukan fungsi dan peranannya masing-masing, hubungan yang semestinya terjadi harus dilandasi kesamaan dalam sikap dan tujuan, bahwa keseluruhan kegiatan yang harus dijalankan mengarah kepada pemberian layanan yang baik kepada peserta didik. Oleh karena itu sangat memungkinkan bila bentuk kerja sama yang terjadi dalam bentuk kemitraan yang sejajar, sehingga menghilangkan prasangka-prasangka yang berkembang, dimana ada kepala sekolah yang merasa risih karena selalu merasa diawasi oleh komite sekolah dalam setiap gerak dan langkahnya. Sehingga ada tindakan berlebih dari komite sekolah sebagai lembaga legislatif sekolah.

Pola kemitraan sejajar ini dimungkinkan akan menempatkan komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah. Kerja sama, keterlibatannya dalam kegiatan perencanaan di sekolah, mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan program kerja komite sekolah yang sudah disesuaikan dengan program sekolah, dan ikut mengawasi kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas bagi penggunaannya.

Kerja sama yang dibangun oleh kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, terutama guna mendapat dukungan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan sekolah harus melekat dalam setiap kegiatan kepemimpinannya, baik secara proses pengambilan keputusan, proses perencanaan sekolah, proses pengembangan kegiatan sekolah, dan proses evaluasi. kepentingan akhirnya adalah potensi yang besar dari masyarakat dapat tertampung dalam muara kelembagaan komite sekolah. Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dalam pelibatan masyarakat dalam sekolah adalah corong informasi sekolah. Informasi-informasi tentang sekolah melalui komite sekolah sampai kepada orang tua dan masyarakat lainnya.

Pola kerja sama antara kepala sekolah dan komite sekolah dalam rangka mensukseskan program sekolah harus termaktub dalam kerangka tata hubungan yang baik terhadap antara sekolah dan masyarakatnya (diwakili komite sekolah). Contoh tata hubungan antara kepala sekolah dan komite sekolah tampak pada bagan di bawah ini. Adapun secara khusus peran komite sekolah sebagai berikut adalah Pertama, Pemberi pertimbangan (*Advisory agency*) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, Pendukung (*Supporting agency*) baik yang terwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keempat, Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan. Kemudian dalam kerjasama antara komite dan kepala sekolah tentunya, pemimpin yang menjadi pelaku utama penggerak sekolah dapat menjalin interaksi yang baik dan hubungan serta memiliki ketrampilan dalam kerjasamanya dengan komite dalam pengembangan pendidikannya.



Bentuk Kerjasama/Interaksi Komite dan Kepala Sekolah

Kerja sama (*cooperation*) merupakan gabungan dari beberapa individu-individu atau sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama timbul apabila orang atau individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk kerja sama yaitu: (a) Kerukunan, mencakup gotong royong dan tolong menolong. (b) *Bargaining*. (c) Kooptasi(*cooptation*). (d)Koalisi (*coalition*). (e) *Join venture*.⁴ Kelima bentuk kerja sama tersebut merupakan bentuk kerja sama antara komite dan kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang diselenggarakannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan bertambah kuatnya kerja sama adalah: (a) adanya orientasi yang sama, (b)adanya bahaya ancaman dari luar, (c) ketersinggungan berkaitan dengan hal-hal yang tertanam kuat dalam kelompok satuan pendidikan, (d) mencapai keuntungan semata-mata menolong.⁵

Hubungan Komite dengan Kepala Sekolah

Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dan keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara sekolah, orang tua, dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat, termasuk dunia kerja. Setiap unsur mempunyai peran yang masing-masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem masyarakat, seperti pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan.

Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat dan sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan dimana kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang bermutu.Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

- a) Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga lembaga lain yang ada di masyarakat termasuk dunia kerja.
- b) Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
- c) Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.⁶

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite madrasah di tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan diatas, Komite madrasah merupakan suatu wadah/lembaga yang

⁴ Nurseno, *Kompetensi Dasar Sosiologi*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 76

⁵ Nurseno, *Kompetensi.....*76

⁶ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 166



mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan. Dalam hal ini komite madrasah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, komite sekolah sebagai wakil masyarakat harus diberikan ruang oleh kepala sekolah untuk bisa mengimplementasikan peran-perannya. Hal itu sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Sugeng bahwa kepala sekolah harus berkompentensi mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah.

Jika dilihat pada struktur organisasinya, keberadaan komite madrasah sejajar dengan kepala madrasah yang dihubungkan dengan garis koordinatif. Berdasarkan garis koordinatif diatas maka, dalam tata hubungan kepala sekolah dan komite sekolah dirumuskan sebagai berikut:

a) Koordinatif

Sesuai Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Ketua Komite harus selalu berkoordinasi dalam penyelenggaraan sekolah.

b) Suportif

Kepala Sekolah dan Ketua Komite saling mendukung, bahu-membahu dalam mewujudkan dan merealisasikan program sekolah, yang tertuang dalam RAPBS dan APBS.

c) Evaluatif

Kepala Sekolah dan ketua komite dapat saling memberi masukan, saran, dan pertimbangan yang positif - konstruktif dalam penyelenggaraan sekolah.

d) Normatif

Kepala Sekolah dan Ketua Komite selalu menjaga norma, etika, dan aturan dalam hubungan tata kerja. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antar pribadi antar lembaga.

e) Kolaboratif

Potensi, kepentingan, tujuan, program, dan visi Kepala Sekolah dan Ketua Komite dapat dipadukan dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Sinergi ini akan sangat membantu pencapaian tujuan dan target lembaga.

f) Komunikatif

Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah harus selalu menjaga dan menjalin tali silaturahmi dan komunikasi yang produktif, konstruktif dan positif. Hal ini dapat meminimalisir mispersepsi, misunderstanding, dan miskomunikasi.

Keterampilan Kepala Sekolah dalam Bekerjasama

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah ini dipengaruhi oleh keterampilan kepala sekolah dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat. Compbel⁷ mengatakan selain tugas adminis trator, Kepala Sekolah juga memiliki tugas komprehensif. Salah satunya adalah menjalin hubungan kemanusiaan dengan masyarakat. Sebab dengan langkah inilah dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan akan terbangun. Pidarta menambahkan kepala sekolah harus memiliki tiga keterampilan, yaitu:

⁷ W. Mantja, *Manajemen Pendidikan dan Supervisi*, (Malang: Wineka Media, 2002), 23



- a) Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan memahami dan mengoperasionalkan organisasi sekolah.
- b) Keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan melakukan kerjasama, memotivasi dan memimpin.
- c) Keterampilan teknis, yaitu kemampuan menerapkan metode -metode dalam pengelolaan sekolah.⁸

Untuk itu, kepala sekolah perlu memiliki keterampilan untuk member motivasi kepada masyarakat serta memberi kesempatan masyarakat atau komite sekolah untuk berperan dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu mampu melakukan pendekatan dan selalu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Hasil penelitian Rumapea tentang Hubungan Kewenangan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru menyatakan, kepemimpinan kepala sekolah akan berjalan dengan baik jika kepala sekolah menggunakan kewenangan yang sesuai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Pendidikan di Madrasah

Kualitas atau kompetensi Tenaga Pendidik

Tugas dan kewajiban guru baik yang terkait langsung dengan proses belajar mengajar maupun tidak terkait langsung, sangatlah banyak dan berpengaruh pada hasil belajar mengajar. Bila peserta didik mendapatkan nilai tinggi, maka guru mendapat pujian. Pantas menjadi guru dan harus dipertahankan. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, yakni para peserta didik mendapat nilai yang rendah, maka serta merta juga kesalahan ditumpukan sang guru.⁹

Oleh karena itu peran serta komite serta kepala sekolah sangatlah diperlukan. Perhatian secara sungguh-sungguh pada guru, dengan cara memberikan prioritas yang tinggi, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan untuk selalu meningkatkan kemampuan sebagai guru. Guru harus diberikan kepercayaan, untuk melaksanakan tugasnya melakukan proses belajar mengajar yang baik. Kepada guru perlu diberikan dorongan dan suasana yang kondusif untuk menemukan berbagai alternatif metode dan cara mengembangkan proses pembelajaran sesuai perkembangan jaman. Agar dapat meningkatkan keterlibatannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru, dia harus memahami, menguasai, dan terampil menggunakan sumber-sumber belajar baru pada dirinya. Untuk itu, maka guru mengenali dan menguasai berbagai sumber pembelajaran modern yang kini semakin familiar dan secara riil dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk para murid.¹⁰

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam hal ini ada empat macam yaitu:¹¹

a) *Kompetensi Pedagogik*

Adalah kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

⁸ Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), 17

⁹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Pendidikan” Peran Serta Masyarakat dalam Anajemen Sekolah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 14

¹⁰ Sagala, *Kemampuan professional Guru dan Tenaga Pendidikan..*, 15

¹¹ Abd. Halim Soebahar, *Matrik Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 183-185



b) *Kompetensi Kepribadian*

Adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c) *Kompetensi Profesional*

Adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan isi standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan konsep dan metode disiplin keilmuan teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

d) *Kompetensi sosial*

Adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara umum, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati, dan semangat kebersamaan. Keempat kompetensi guru tersebut bersifat holistik, terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.

Integrasi Kompetensi Peserta Didik

Berdasarkan pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional, yakni sebagai berikut:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas, pengembangan kemampuan peserta didik mencakup tiga hal yaitu: (a) Pengembangan potensi kognitif (b) Fisik dan (c) Psikomotorik¹²

a) *Kompetensi Kognitif*

Pada dasarnya hakikat pengembangan potensi kognitif terletak pada upaya peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berfikir, menciptakan serta kreativitas seseorang. Proses kognitif (*cognitive processes*) meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi, dan bahasa individu.¹³

¹² Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003

¹³ Marsudi, Saring, dkk. *Perkembangan Peserta Didik*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), 12.



Seperti misalnya, merangkai satu kalimat yang terdiri atas dua kata, menghafal syair, membayangkan seperti apa rasanya menjadi bintang tokoh, dan memecahkan suatu teka teki silang, semuanya mencerminkan peran proses kognitif dalam pengembangannya. Tingkat intelegensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Intelegensi mempengaruhi cara individu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin mudah dan cepat ia menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Pengembangan kognitif dimaksudkan agar individu mampu mengembangkan kemampuan persepsinya, ingatan, berpikir, pemahaman terhadap simbol, melakukan penalaran dan memecahkan masalah. Pengembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, kematangan, minat dan bakat, pembentukan dan kebebasan dari berbagai pengaruh sugesti.

b) Kompetensi Afektif

Kompetensi afektif merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, aspirasi dan penyesuaian perasaan. Krathwohl dalam Sahlan, mengembangkan aspek ini secara hierarki adalah sebagai berikut:

Tingkatan *pertama*, penerimaan (*receiving*), sebagai tingkatan paling rendah yang berhubungan suatu keadaan sadar, kemauan untuk menerima, perhatian terpilih. *Kedua*, merespon (*responding*), berkaitan dengan penerimaan untuk menanggapi kepada peran serta aktif dalam kegiatan tertentu. *Ketiga*, menilai atau menghargai (*valuing*), berkaitan dengan penerimaan terhadap nilai tertentu. *Keempat*, pengorganisasian (*organisation*), merupakan penerimaan individu terhadap bermacam-macam nilai yang berbeda-beda dari sesuatu sistem nilai tertentu yang sifatnya lebih tinggi. *Kelima*, pengkarakterisasian dari nilai atau kelompok nilai (*characterization by value complex*), merupakan dominon afektif tertinggi. Tingkatan ini merupakan kemampuan individu sesuai dengan sistem nilai tertentu seperti sikap objektif.¹⁴

c) Kompetensi Psikomotorik

Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan latihan yang menuju kearah peningkatan kemampuan anak. Pengembangan ini memerlukan rangsangan yang kuat agar perkembangan potensi psikomotorik anak bisa optimal. Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan pengajaran. Dengan peningkatan kemampuan motorik, anak akan mampu menerima pengajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikanya. Stimulasi Untuk Meningkatkan Potensi Psikomotorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan anak menstimulasi mereka untuk bergerak secara bebas. Stimulasi dapat dilakukan dengan menyediakan ruang gerak yang memungkinkan untuk berlari melompat dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dengan cara cara yang maksimal. Pada anak anak dapat dilakukan stimulasi diantaranya dengan: (a) Diberikan dasar dasar ketrampilan untuk menulis dan menggambar; b) Ketrampilan berolah raga atau menggunakan alat olah raga; c) Gerakan gerakan permainan, seperti melompat memanjat dan berlari baris berbaris secara sederhana. Kemampuan motorik halus bisa dikembangkan dengan cara menggambar, menari, memainkan alat musik (piano, gitar). Peningkatan potensi psikomotorik halus ini merupakan modal dasar untuk menulis.¹⁵

¹⁴ Moh. Sahlan, *Penilaian Berbasis Kelas; Teori dan Aplikasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006)*, (Jember: Center For Society Studies, 2007), 19-20

¹⁵ Hidayah, Dhini Ferry, "Perkembangan Peserta Didik". *Makalah*. (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2010)

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang urgen dalam pelaksanaan pembelajaran. tanpa adanya sarana prasarana sangat tidak mungkin proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Akan tetapi banyak juga lembaga-lembaga yang maju akan sarana dan prasarananya, yang dalam pembelajaran juga masih belum efektif dan efisien karena kurangnya memberdayakan sarana dan prasaranya yang ada atau tersedia. Untuk itu bagaimana sarana dan prasarana yang ada tersebut di berdayakan untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran.

Adapun ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka sarana prasarana dibedakan menjadi 3 macam yaitu.¹⁶

- a) Alat pelajaran
- b) Alat peraga
- c) Alat pengajaran

Menurut suharsimi, dijelaskan bahwa yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung.¹⁷

Untuk itu ditegaskan juga dalam permendiknas no. 24/2007. Oleh Sebab itu, sekolah berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang standar sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Kadang-kadang pengertian tentang alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan masih sukar dibedakan orang. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Alat ini berwujud buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktek. Adanya pengertian tentang sarana dan prasarana diatas, kemudian bagaimana sarana dan prasarana yang ada dimenejemeni dengan baik agar sarana yang ada terjadi dan dapat di dimanfaatkan kapan saja jika akan di gunakan dalam proses belajar belajar.

Untuk itu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memenejemeni sarana prasarana tersebut.¹⁸

- a) Penentuan kebutuhan
- b) Proses pengadaan
- c) Pemakaian
- d) Pencatatan/pengurusan
- e) Pertanggung jawaban

Adapun dalam menetapkan kebijakan program tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana dengan mengacu pada standar saran prasarana dalam hal :¹⁹

- a) Merencanakan, memenuhi, dan mandayagunakan sarana dan prasaran pendidikan.
- b) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan.
- c) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah.
- d) Menyusun skala proiritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.
- e) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Pengelolaan Material*, (Yogyakarta: Jurusan AP, IKIP1979), 9

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan*, 80

¹⁸ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 115

¹⁹ Nurdin Matry, *Implementasi Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah* (Makassar: Aksara Madani: 2008), 117



Kesimpulan

Pola kerja sama Komite Madrasah dan Kepala Madrasah dalam pengembangan kompetensi pendidik dimulai kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik bagi komite sendiri maupun kepala sekolah. Kerja sama antara komite dan kepala madrasah tersebut dalam bentuk rapat bulanan. Pada agenda rapat bulanan tersebut biasanya membahas perihal apa saja masalah-masalah yang ada, atau pelaporan tentang keuangan yang sudah didapat dan dikeluarkan. Dalam kerja sama yang dijalin antara komite dan kepala madrasah secara Individu terjalin hubungan yang baik, dengan konsep saling menghargai dan saling menghormati. Hubungan yang dijalin seperti halnya jika terjadi suatu masalah maka dapat dipecahkan dengan cara memberikan usulan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam penyelesaian masalah yang ada atau dengan jalinan komunikasi, mengadakan rapat untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu juga hubungan yang dijalin dengan memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan. Hubungannya mendatar artinya garis itu mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas, saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas, memecahkan masalah yang timbul diantara orang-orang yang berada dalam tingkat yang sama, menjamin pemahaman yang sama. Dengan kompetensi guru/pendidik perlu dikembangkan dengan mengadakan suatu pelatihan. Dimana pelatihan tersebut biasanya tentang kertampilan bagaimana mengajar dengan baik, kemudian tentang menjadi guru profesional. Pelatihan tersebut diadakan dengan cara mendatangkan tutor dari lembaga yang lebih maju dan kompeten di bidangnya. Misalnya, tutor dari perguruan tinggi Negeri, mengadakan MGMP antar guru bidang studi dan juga antar sekolah.



Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Pengelolaan Material*. Yogyakarta: Jurusan AP IKIP, 1979.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Peraturan dan Sistem Pendidikan Nasional* 2006.
- Hidayah, Dhini Ferry. *Perkembangan Peserta Didik. Makalah*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2010.
- LIPI. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Diantara Peluang dan Tantangan*. Menteng Jakarta: LIPI Pers, Anggota IKAPI, 2008.
- Mantja, W. *Manajemen Pendidikan dan Supervisi*. Malang: Wineka Media, 2002.
- Marsudi, Saring, dkk. *Perkembangan Peserta Didik*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Matry, Nurdin. *Implementasi Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. Makassar: Aksara Madani: 2008.
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurseno. *Kompetensi Dasar Sosiologi*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk. *Komite sekolah; Sejarah dan Prospeknya Di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008.
- Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Pendidikan” Peran Serta Masyarakat dalam Anajemen Sekolah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Sahlan, Moh. *Penilaian Berbasis Kelas; Teori dan Aplikasi dalam Kurikullum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006)*. Jember: Center For Society Studies, 2007.
- Sitem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003
- Soebahar, Abd. Halim. *Matrik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009.
- Subroto, Suryo. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

